



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 merupakan wujud komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Seluruh proses kinerja telah melalui tahapan pengukuran, evaluasi, analisis, dan pelaporan secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025.

Laporan ini juga menggambarkan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta menyajikan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan percepatan peningkatan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penyusunan LKjIP ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *good governance*, khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ini masih belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat Kota Batam.

Batam, 3 Maret 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

Dr. LEO PUTRA, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19750806 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	3
1.4. Sistematika Penyajian LKjIP	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Visi dan Misi	19
2.2. Tujuan dan Sasaran	20
2.3. Program dan Kegiatan	22
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025	23
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja	29
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	30
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun Sebelumnya.....	31
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan	33

3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	34
3.2.1.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan dan Solusi	34
3.2.2.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)	42
3.2.3.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	46
3.3	Realisasi Anggaran	88
BAB IV	PENUTUP	93
4.1.	Kesimpulan	93
4.2.	Saran	94

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan Desember 2025	17
Tabel II.1.	Tujuan, sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025	21
Tabel II.2.	Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dukungan Anggaran Tahun 2025 (Perubahan) Dinas Perhubungan	24
Tabel III.1.	Skala Pengukuran Kinerja LKjIP	29
Tabel III.2.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	31
Tabel III.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan	33
Tabel III.4.	Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dinas Perhubungan	35
Tabel III.5.	Pencapaian Target Kinerja dan Anggaran 2025	43
Tabel III.6.	Data Prasarana Keselamatan yang Telah Terbangun s.d Tahun 2025	47
Tabel III.7.	Lokasi Pembangunan Papan Nama Jalan Tahun 2025 ..	57
Tabel III.8.	Lokasi Pembangunan Rambu Parkir Tahun 2025	59

Tabel III.9. Data dan Lokasi APILL Non ATCS	64
Tabel III.10. Data dan Lokasi APILL ATCS	64
Tabel III.11. Lokasi Pengecatan Marka Jalan Tahun 2025 (M ²)	65
Tabel III.12. Lokasi Pengecatan Pita Penggadu Tahun 2025 (M ²)	67
Tabel III.13. Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2025	72
Tabel III.14. Data Kendaraan Lulus Uji di Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025	72
Tabel III.15. Data Bus Trans Batam dengan Pola By The Service Dinas Perhubungan Kota Batam	79
Tabel III.16. Data Pemeliharaan Dermaga Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam	85
Tabel III.17. Realisasi Anggaran Tahun 2025	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam	5
Gambar 1.2. Bagan Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam	18
Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam TA 2025.....	27
Gambar 3.1. Kapal Sri Lenggang	39
Gambar 3.2. Speed Sri Jaloh	39
Gambar 3.3. Speed Sri Nipah	39
Gambar 3.4. Speed Sri Mecan	40
Gambar 3.5. 3 (tiga) Unit Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023 untuk Angkutan Anak Sekolah di Wilayah Hinterland	41
Gambar 3.6. Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023 untuk Angkutan Anak Sekolah di Wilayah Hinterland....	41
Gambar 3.7. Halte Politeknik Batam TA 2025	47
Gambar 3.8. Halte Pandawa TA 2025	48
Gambar 3.9. Halte Bundaran Tembesi TA 2025	48

Gambar 3.10.Halte Puskopkar TA 2025	48
Gambar 3.11.Halte Base Camp TA 2025	49
Gambar 3.12.Halte Bambu Kuning TA 2025.....	49
Gambar 3.13.Halte Putri Hijau Sagulung TA 2025.....	49
Gambar 3.14.Halte Plamo Garden TA 2025.....	50
Gambar 3.15.Halte Batu Besar TA 2025.....	50
Gambar 3.16.Halte Sangrila Sekupang TA 2025.....	50
Gambar 3.17.Pedestrian Bida Asri 1 TA 2025	51
Gambar 3.18.Pedestrian Bukit Kemuning TA 2025	51
Gambar 3.19.Rambu Lalu Lintas Standar	57
Gambar 3.20.Papan Nama Jalan TA 2025	58
Gambar 3.21.Rambu Type F TA 2025	58
Gambar 3.22.Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) TA 2025	58
Gambar 3.23.Rambu Parkir TA 2025	60
Gambar 3.24.Casteen depan SMA 20 Jl. Pemuda TA 2025	60
Gambar 3.25.Pemeliharaan JPO Depan SMPN 3 Sekupang	60

Gambar 3.26. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	61
Gambar 3.27. ZoSS SDN 008 Tanjung Riau Sekupang	61
Gambar 3.28. ZoSS SDN 001 Tanjung Riau Sekupang	62
Gambar 3.29. ZoSS SDN 011 Sei Binti Sagulung	62
Gambar 3.30. APILL Simpang KDA Dalam	62
Gambar 3.31. APILL Simpang Nan Tongga	63
Gambar 3.32. APILL Simpang Panasonic Batam Centre	63
Gambar 3.33. Pengecatan Marka Jalan Tahun 2025	63
Gambar 3.34. Pengecatan Pita Penggaduh	68
Gambar 3.35. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	73
Gambar 3.36. Kartu Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe Card)	74
Gambar 3.37. Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan dan Kalibrasi	75
Gambar 3.38. Pelaksanaan Razia Kendaraan Angkutan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kota Batam	76
Gambar 3.39. Bus Sekolah Pengadaan Tahun 2025	80

Gambar 3.40. Angkutan Umum wilayah Hinterland	83
Gambar 3.41. Kapal Angkutan anak sekolah (Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023)	84

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029 telah ditetapkan pada tanggal 19 September 2025 melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 telah mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Dinas Perhubungan Kota Batam menetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi arah kebijakan dan tolok ukur kinerja organisasi.

Tujuan yang ditetapkan adalah *meningkatnya kualitas pelayanan transportasi Kota Batam*, dengan indikator kinerja berupa **rasio konektivitas**. Pada tahun 2025, capaian indikator ini mencapai **92%**, dengan target sebesar **0,811** dan realisasi sebesar **0,748**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas konektivitas transportasi di Kota Batam telah berjalan sesuai arah perencanaan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Pencapaian tujuan tersebut didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1: *Meningkatnya kualitas layanan angkutan darat*

Indikator yang digunakan adalah **rasio konektivitas darat**, dengan capaian sebesar **99%** dari target **0,909** dan realisasi sebesar **0,900**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan angkutan darat telah berjalan optimal dan mendekati target yang ditetapkan. Sasaran ini didukung oleh pelaksanaan **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**.

Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas laut

Indikator yang digunakan adalah **rasio konektivitas laut**, dengan capaian sebesar **100%**, di mana target sebesar **0,583** telah terealisasi sepenuhnya sebesar **0,583**. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan serta mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah hinterland. Sasaran ini didukung oleh **Program Pengelolaan Pelayaran**.

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

Indikator yang digunakan adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** pada Dinas Perhubungan, dengan capaian sebesar **99%** dari target **90,42**, dan realisasi sebesar **89,77**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah berada pada kategori baik, meskipun masih perlu peningkatan untuk mencapai target secara maksimal. Sasaran ini didukung oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam telah selaras dengan arah kebijakan dalam Renstra 2025–2029. Hasil ini menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang.



BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Batam merupakan bentuk komitmen nyata Dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Batam yang baru pada akhir tahun 2024 dan dengan telah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 dimana memuat Visi Kepala Daerah terpilih yaitu ***Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.***

Dalam mengemban visi Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kota Batam akan meningkatkan kualitas layanan angkutan darat serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas laut.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Batam
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kota Batam untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKjIP adalah :

Maksud :

- a. Sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Perhubungan Kota Batam kepada Walikota Batam selaku pemberi kewenangan
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam

- c. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja Dinas Perhubungan Kota Batam

Tujuan :

- a. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Batam
- b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kota Batam
- c. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan
- d. Perbaikan dalam perencanaan, beberapa perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 36 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam, struktur organisasi Dinas Perhubungan mengalami perubahan, yaitu dengan dilakukannya penyesuaian pada salah satu bidang, di mana Bidang Laut diubah menjadi Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Perubahan struktur organisasi tersebut berdampak pada penyesuaian tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam penguatan aspek pengembangan sektor perhubungan serta peningkatan keselamatan transportasi. Bidang Pengembangan dan Keselamatan diarahkan untuk mengintegrasikan perencanaan pengembangan sarana prasarana perhubungan dengan upaya peningkatan standar keselamatan, pengawasan operasional, serta pembinaan kepada pengguna jasa transportasi.

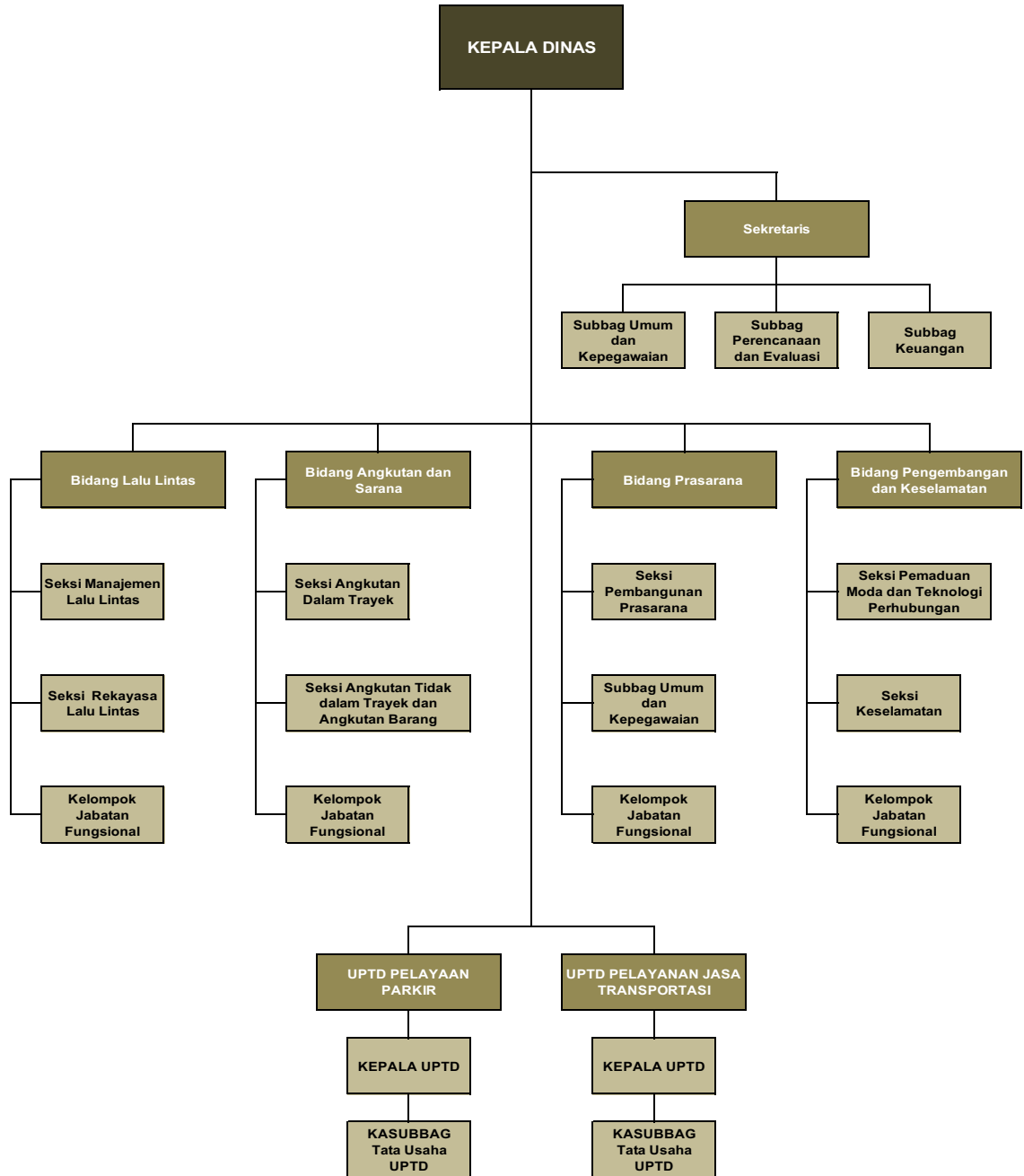
Penyesuaian kelembagaan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam, terutama dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama bidang transportasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Batam melakukan penyesuaian perencanaan kinerja, penganggaran, serta pembagian tugas aparatur sesuai struktur organisasi yang baru guna memastikan kesinambungan pelaksanaan program serta optimalisasi capaian kinerja tahunan.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

(PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 36 TAHUN 2025)



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Batam

Sebagaimana Struktur Organisasi diatas, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, bidang prasarana dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, bidang prasarana dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, bidang prasarana dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menetapkan program dan rencana kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Sarana,

Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan dan UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkungan Dinas;

- i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan perhubungan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
- k. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;
- m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
- n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang;
- o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- p. menetapkan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;
- q. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- r. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Sarana, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 2 UPTD, yaitu :

- 1. Sekretariat
- 2. Bidang Lalu Lintas
- 3. Bidang Angkutan dan Sarana
- 4. Bidang Prasarana
- 5. Bidang Pengembangan dan keselamatan
- 6. UPTD Pelayanan Jasa Transportasi
- 7. UPTD Pelayanan Parkir

A. SEKRETARIAT

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program

dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.

- Fungsi :
- a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja dilingkup Dinas;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN.
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
 - g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

B. BIDANG LALU LINTAS

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas.

- Fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Sarana.

- Fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG PRASARANA

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana.

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana,
- c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

F. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

- Fungsi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan;
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pelayanan Jasa Transportasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 mempunyai;

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat

pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

- Uraian Tugas:
- a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - c. membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - d. melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - f. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - g. melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - h. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
 - i. melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
 - j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;

- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- m. menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

H. Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pelayanan Parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018, mempunyai:

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Uraian Tugas: a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;

- b. membuat usulan kebutuhan kegiatan pengawasan pelayanan parkir rutin tahunan;
- c. membuat perencanaan teknis operasional tata kelola pelayanan parkir;
- d. melaksanakan tugas di bidang pelayanan parkir;
- e. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
- h. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasaran parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
- j. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan pelayanan parkir;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;

- m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
- n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas teknis operasional penunjang UPTD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kualifikasi pendidikan. Berdasarkan komposisi pegawai per Desember 2025, total aparatur yang bertugas terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Tenaga Harian Lepas (THL), yang tersebar pada Sekretariat, bidang-bidang teknis, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Ditinjau dari tingkat pendidikan, mayoritas aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, khususnya pada jenjang Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kapasitas kompetensi aparatur berada pada level yang cukup baik dalam mendukung perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengawasan teknis di bidang perhubungan. Dominasi pegawai berpendidikan sarjana juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis kinerja.

Selain aparaturnya tetap, Dinas Perhubungan Kota Batam juga didukung oleh Tenaga Harian Lepas yang sebagian besar ditempatkan pada unit pelayanan operasional, terutama pada UPT Trans Batam, untuk memastikan kelancaran pelayanan transportasi kepada masyarakat. Kehadiran THL ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas layanan serta responsivitas terhadap kebutuhan lapangan yang bersifat teknis dan dinamis.

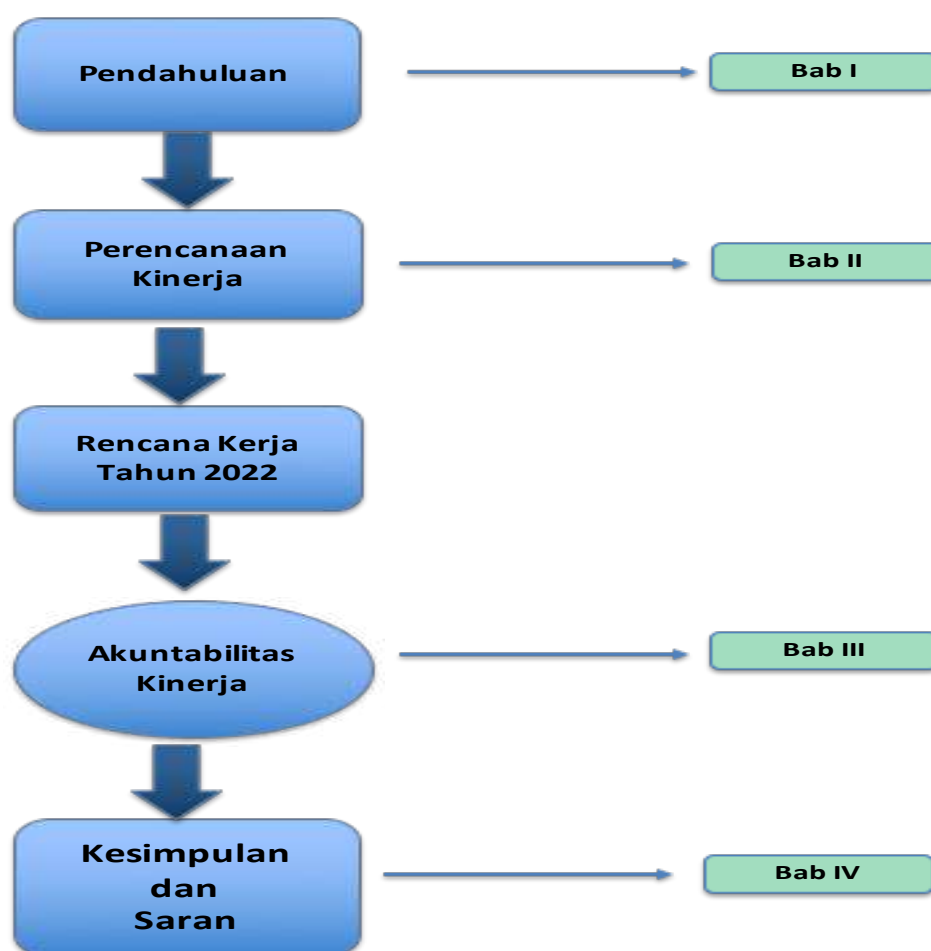
Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan Desember 2025

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-III	D-IV	S1	S2	
PNS									
1	Sekretariat			1	3	1	7	2	14
2	Bidang Lalu Lintas			1	1		6	1	9
3	Bidang Angkutan dan Sarana			7	1		7		15
4	Bidang Prasarana			1			1	3	5
5	Bidang Pengembangan dan Keselamatan			4	1		7	1	13
6	UPTD Trans Batam			1			4	2	7
7	UPTD Parkir			2			4		6
JUMLAH PNS									69
PPPK									
1	Sekretariat			5	1		5		11
2	Bidang Lalu Lintas			8			5		13
3	Bidang Angkutan dan Sarana			3		1	5		9
4	Bidang Prasarana			2	2		1		5
5	Bidang Pengembangan dan Keselamatan			2	3				5
6	UPT Trans Batam	1	2	123	2	1	7		136
7	UPT Parkir			13	1		1		15
JUMLAH PPPK									194
THL									
1	Sekretariat								0
2	Bidang Lalu Lintas								0
3	Bidang Angkutan dan Sarana								0
4	Bidang Prasarana								0
5	Bidang Pengembangan dan Keselamatan								0
6	UPT Trans Batam		2	36			11		49
7	UPT Parkir								0
JUMLAH THL									49

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.2. Bagan Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Batam Nomor 73 Tahun 2025 pada tanggal 19 September 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2025=2029 maka untuk laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 mengacu pada Renstra yang baru.

2.1. VISI DAN MISI

Visi Walikota Batam tahun 2025-2029

“Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”

Misi Walikota Batam periode 2025 - 2029

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penjabaran dari Misi Walikota Batam, Dinas Perhubungan berada dalam misi ke 2 (dua) yaitu ***Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.***

Dalam rangka mendukung pelaksanaan janji politik Wali Kota terpilih, telah ditetapkan 15 (lima belas) program unggulan pembangunan daerah. Salah satu program unggulan tersebut berada dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu ***penataan sistem transportasi publik yang terintegrasi melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) serta pembangunan Light Rail Transit (LRT).*** Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Kota Batam yang mana sesuai dengan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi Kota Batam”**.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan Kota Batam dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam mewujudkan misi ke 2 adalah ‘Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi Kota Batam’ dengan indikator tujuan ratio konektivitas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kota Batam, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Batam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi Kota Batam		Ratio Konektivitas	0,811	0,836	0,861	0,861	0,861	0,861
	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
	Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	0,667	0,750	0,750	0,750	0,750
	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	90,42	90,45	90,48	90,51	90,54	90,58

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pelayaran

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam rencana kinerja tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome. Komponen

rencana kinerja memuat tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2025 telah menetapkan 15 kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Renstra 2025-2029. Adapun Target Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel.II.2
Rencana Kinerja Tahun 2025 dan
Dukungan Anggaran Tahun 2025 (Perubahan)
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	91%	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	63%	81.065.369.383,00
1.1.1	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan darat yang terbangun	100%	3.814.781.500,00
1.1.2	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan pembangunan ZOSS dalam 1 tahun	100%	22.250.658.380,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5%	
1.1.3	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) Baru	1147 SRP	11.953.325.200,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	50%	
1.1.4	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan kegiatan PKB	100%	501.532.320,00
1.1.5	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas pada tahun berjalan	100%	1.329.600.000,00

NO	SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN TAHUN 2025
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)KEGIATAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	10%	
1.1.6	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam	40%	41.215.471.983,00
2	SASARAN 2: Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	130%	6.177.166.848
2.1.1	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah unit Transportasi Laut yang beroperasi	7 Unit	4.846.826.848
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasaana Perhubungan Laut yang tersedia	69%	
2.1.2	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dermaga yang dibangun dan dipelihara pada tahun berjalan	100%	1.330.340.000
3	SASARAN: Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	90,42	
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	100%	40.240.637.925,00
3.1.1	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	23.437.404.245,00
3.1.2	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	24.478.000,00
3.1.3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	221.424.000,00
3.1.4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	1.624.195.000,00
3.1.5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	1.730.390.680,00
3.1.6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	702.746.000,00
3.1.7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan BLUD	100%	12.500.000.000,00

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan terwujudnya akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 telah disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, yang telah selaras dengan arah kebijakan dan tujuan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029.

Adapun rincian sasaran, indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 secara lengkap tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 yang telah ditandatangani bersama Wali Kota Batam, sebagaimana yang tertera pada data berikut:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AMSAKAR AHMAD**
Jabatan : **Wali Kota Batam**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



AMSAKAR AHMAD

Batam, 22 September 2025

Pihak Pertama,



Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si
NIP. 19750808 199501 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Konektivitas Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909
2.	Meningkatnya Konektivitas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,333
3.	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perhubungan	90,42

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp81.065.369.383,-	
2.	Program Pelayaran	Rp6.177.166.848,-	
3.	Program Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Rp40.241.987.925,-	
Jumlah Anggaran		Rp127.484.524.156,-	

Wali Kota Batam,



AMSAKAR AHMAD

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam



Drs. LEO PUTRA, A.P., M.Si
NIP. 19750808 199501 1 001

Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam TA 2025



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemberi mandat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui media pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari sistem akuntabilitas yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029. Namun demikian, Rencana Kinerja Tahun 2025 masih berpedoman pada target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021–2026, sehingga pelaksanaan dan pengukuran kinerja tahun berjalan tetap memperhatikan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun secara selaras dengan dokumen perencanaan strategis, guna menjamin konsistensi, transparansi, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Produk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

TABEL III.1.
SKALA PENGUKURAN KINERJA LKjIP

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 - 90,99%	Tinggi
3	66 - 75,99%	Sedang
4	51 - 65,99%	Rendah
5	$\leq 50,99\%$	Sangat Rendah

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara

membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (Impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja output dan outcome inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam.

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra 2025-2029 yang dalam hal ini masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Untuk Tahun 2025 ini total pagu dana dalam renja perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami kenaikan sebesar Rp.25.523.082.576,- atau 25,03% dari pagu dana pada APBD Murni sebesar Rp.101.960.091.580,- menjadi 127.483.174.156,- pada APBD Perubahan.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL III.2
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN %	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Transportasi Kota Batam		Ratio Konektivitas	0,811	0,805	99%	Sangat Tinggi
1.1		Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909	0,900	99%	Sangat Tinggi
1.2		Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	0,583	100%	Sangat Tinggi
1.3.		Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	90,42	89,77	99%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan baik dalam urusan Perhubungan dan urusan penunjang masuk dalam kategori sangat tinggi.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kota Batam telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2025. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui metode perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai

pada Tahun 2025. Selain itu, dalam kondisi normal, capaian kinerja juga dianalisis secara komparatif dengan capaian tahun sebelumnya untuk melihat tren peningkatan atau penurunan kinerja organisasi. Metode ini memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Informasi tersebut juga penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Namun demikian, Tahun 2025 merupakan tahun transisi kepemimpinan kepala daerah yang sekaligus menjadi awal periode perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, target dan realisasi kinerja Tahun 2025 untuk pertama kalinya menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029. Dengan adanya perubahan indikator kinerja tersebut, maka capaian indikator kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya yang masih mengacu pada dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Meskipun demikian, evaluasi internal tetap dilakukan untuk memastikan kesinambungan program, konsistensi arah kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan perbandingan antara target kinerja jangka menengah (RPJMD) dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan tahun 2025. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan evaluasi kedepan untuk memperbaiki kinerja Dinas guna mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan
Target Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET AKHIR RPJMD 2029	TINGKAT CAPAIAN (%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,900	0,909	99%	
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	0,750	78%	
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	89,77	90,58	99%	

3.2. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada dasarnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam selama Tahun 2025. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi

Dinas Perhubungan Kota Batam mengemban 3 (tiga) Sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari hasil capaian kinerja sebagaimana pada tabel III.2 semua indikator kinerja mencapai hasil sangat tinggi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sebagaimana berikut:

Tabel III.4
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ANALISA KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909	0,900	99%	kinerja pada sektor konektivitas darat berada dalam kategori berhasil, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Selisih capaian dipengaruhi oleh belum terlaksananya pemenuhan jumlah koridor angkutan Trans Batam yang ditargetkan berjumlah 10 koridor baru terlaksana 9 koridor	Optimalisasi rute dan penyesuaian trayek berdasarkan kebutuhan dan pola pergerakan masyarakat
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	0,583	100%	Capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa indikator rasio konektivitas laut telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan optimalnya penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi laut, serta efektivitas koordinasi dengan instansi terkait dan operator layanan. Keberhasilan ini juga didukung oleh stabilitas operasional pelabuhan dan tersedianya akses layanan sesuai kebutuhan masyarakat.	1. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan transportasi laut 2. Mendorong peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut.
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	90,42	89,77	99%	tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Perhubungan berada dalam kategori sangat baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Perbedaan nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kecepatan pelayanan, kemudahan akses informasi, serta respons terhadap pengaduan.	1. Penguatan sistem pengaduan dan tindak lanjut respons masyarakat secara lebih cepat dan terukur. 2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan prima (service excellence).

Dari tabel diatas pencapaian sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : ***Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat,***

dengan indikator kinerja ratio konektivitas darat, dengan perhitungan jumlah trayek/koridor yg dilayani dikali bobot trayek/koridor dibagi jumlah kebutuhan trayek/koridor Indikator ini hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 99% dari target sasaran 0,909 dan realisasi sasaran 0,900, dimana jumlah trayek/koridor yang dilayani adalah trayek Trans Batam yang saat ini sudah melayani sebanyak 9 trayek/koridor dari jumlah kebutuhan adalah 10 trayek/koridor. Satu Koridor yang belum dapat dilayani oleh UPT Trans Batam adalah trayek/koridor Tembesi – Galang, yang saat ini sudah dilayani oleh Perum Damri dibawah koordinator BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

9 (sembilan) trayek/koridor yang telah dilayani dengan rute adalah:

1. Koridor Sekupang – Batam Centre yang melewati Sei Harapan – Tiban - UIB - Simp. Sei Panas - Kantor Walikota - Mega Mall
2. Koridor Tanjung Uncang – Batam Centre yang melewati Simpang Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Batu Aji - Simpang Bareleng - Muka Kuning - Kepri Mall - Kantor Walikota - Mega Mall
3. Koridor Sekupang – Jodoh yang melewati Sei Harapan - Tiban - UIB - Simp. Baloi - Penuin - Nagoya - Simp. Mc Donald - Terminal Jodoh - DC Mall - Pasar Induk
4. Koridor Sagulung – Sekupang yang melewati Pelabuhan Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Marina - Tanjung Riau - Sei Harapan

5. Koridor Tanjung Piayu – Batam Centre yang melewati Piayu Laut - Simpang Bagan - Muka Kuning - Panbil - Kepri Mall - Kantor Walikota
6. Koridor Jodoh – Batam Centre yang melewati Harbourbay - Batu Ampar - Sei Panas – BNI
7. Koridor Nongsa – Batam Centre yang melewati Teluk Mata Ikan - Kapling Sambau - Simpang Batu Besar - Simpang Bandara - SMU3 - Simpang Dotamana - Simpang Kantor Camat Kota Batam - Simpang KDA - Mega Mall
8. Koridor Nongsa – Jodoh yang melewati Batu Besar - Sudirman - Raden Patah - *Nagoya Hill*
9. Koridor Punggur – Nongsa yang melewati Punggur – Kabil – Sambal – Teluk Mata Ikan

Pencapaian indikator sasaran ini melalui ***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

2. Sasaran 2: ***Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Lalu Lintas Laut***

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja *rasio konektivitas laut*, yang dihitung berdasarkan jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi dikalikan bobot lintas, kemudian dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan dan dikalikan 100 persen.

Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai kinerja sebesar **100%**, dengan realisasi sebesar **0,583** dari target yang telah ditetapkan sebesar **0,583**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lintas penyeberangan telah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Capaian ini

menunjukkan komitmen Dinas Perhubungan dalam menjaga konektivitas wilayah kepulauan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi laut yang memadai dan berkelanjutan

Jumlah lintas penyeberangan atau transportasi laut yang beroperasi pada tahun 2025 tercatat sebanyak 7 unit, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari jumlah tersebut, layanan transportasi laut terdiri dari:

1. Transportasi laut yang melayani masyarakat yang terdiri atas 1 unit kapal KM Sri Lengkang dan 3 unit speed boat, yaitu *Sri Jaloh*, *Sri Mecan*, dan *Sri Nipah*. Armada tersebut beroperasi secara rutin sebanyak tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Sabtu, dengan rute pelayanan sebagaimana telah ditetapkan, yaitu:
 1. Rute KM Sri Lengkang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
 2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
 3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
 4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang



Gambar 3.1. Kapal Sri Lengkang



Gambar 3.2. Speed Boat Sri Jaloh



Gambar 3.3. Speed Boat Sri Nipah



Gambar 3.4. Speed Boat Sri Mecan

2. Transportasi laut anak sekolah merupakan sarana transportasi laut yang beroperasi dari hibah Kementerian Sosial pada bulan November 2023 berupa 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah diwilayah hinterland, dengan rute:

Rute 1 : Pulau Gara - Pulau Lingka - Pulau Bertam

Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Pulau Gara – Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Rute 2 : Pulau Mecan - Pulau Sarang - Pulau Lengkang - Pulau Sambu - Belakang Padang

Belakang Padang – Pulau Sarang – Pulau Mecan – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Pulau Mecan – Belakang Padang – Pulau Sambu – Pulau Lengkang – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Rute 3 : Pulau Terong – Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting - Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting – Pulau Tumbar – Pulau Terong



Gambar 3.5. 3 (Tiga) Unit Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023



Gambar 3.6. Kapal Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023 untuk angkutan anak sekolah di wilayah hinterland

Pencapaian indikator sasaran ini melalui ***Program Pelayaran***.

3. Sasaran 3: ***Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan***

Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* pada Dinas Perhubungan. Pada Tahun 2025, capaian indikator mencapai 99% dengan realisasi nilai sebesar 89,77 dari target yang ditetapkan sebesar 90,42.

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan hasil kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan, khususnya pada layanan Trans Batam dan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Secara umum, hasil penilaian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori sangat baik.

Meskipun demikian, masih terdapat sedikit selisih dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, baik dari aspek kecepatan layanan, kenyamanan, maupun profesionalisme petugas.

Pencapaian sasaran ini didukung melalui pelaksanaan *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*, yang berperan dalam memperkuat tata kelola pelayanan serta mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah.

3.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

1. DANA

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja aspek keuangan mempunyai pengaruh yang tinggi. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat anggaran untuk belanja langsung sebesar

Rp.127.483.174.156,00 dan telah dapat direalisasikan sebesar
Rp114.695.934.671,00 dengan persentase sebesar 89,97%.

TABEL III.5
PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN ANGGARAN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2025			ANGGARAN TAHUN 2025			TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Darat	0,909	0,900	99%				
	PROGRAM Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	INDIKATOR POGRAM: Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia	63%	65%	103%	81.065.369.383	75.265.529.634	92,85%	7,15%
		INDIKATOR POGRAM: Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	5%	34%	680%				
		INDIKATOR POGRAM: Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR	50%	47%	95%				
		INDIKATOR POGRAM: Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)	10%	9%	86%				
2	SASARAN 2: Meningkatnya Ketersediaan Sarpras Lalu Lintas Laut	Rasio Konektivitas Laut	0,583	0,750	78%				
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	INDIKATOR POGRAM: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia pada tahun berjalan	69%	69%	100%	6.177.166.848	5.762.996.401	93,30%	6,70%
		Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan	130%	147%	113%				
3	SASARAN 3: Meningkatnya Kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	89,77	90,58	99%				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Dinas Perhubungan	90,42	89,77	99%	40.240.637.925	33.667.408.636	83,67%	16,33%
		Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	72,81	72,81	100%				
						127.483.174.156	114.695.934.671	89,97%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya serapan anggaran/pembiayaan untuk setiap program pada masing-masing indikator kinerja dirasa telah cukup/efisien dalam pencapaian target kinerja. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik, perlu diimbangi dengan besar anggaran yang lebih baik pula.

2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting yang mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi faktor penunjang kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya meliputi:

2.1. Fasilitas Tempat

Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki ruang rapat/aula yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan rapat teknis, kegiatan pembinaan, serta penerimaan tamu kedinasan baik dari dalam maupun luar daerah. Untuk kegiatan dengan skala yang lebih besar, aula Dinas Perhubungan dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan kapasitas ruangan lebih luas.

2.2. Inventaris dan Peralatan Pendukung

Selain fasilitas tempat, Dinas Perhubungan Kota Batam didukung oleh berbagai inventaris dan peralatan, antara lain meja, kursi, komputer, printer, proyektor, kendaraan dinas pimpinan,

kendaraan dinas operasional, kendaraan derek, serta perlengkapan lainnya. Seluruh inventaris tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran, rapat teknis, serta pelaksanaan pengawasan, penertiban, dan kegiatan operasional di lapangan.

Dengan pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal, penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam pencapaian target kinerja. Kuantitas personel yang memadai dan didukung oleh kualitas serta kompetensi yang sesuai menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Batam didukung oleh 312 personel yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Harian Lepas (THL). Seluruh personel tersebut diberdayakan secara optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan jabatan masing-masing, baik dalam pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal.

Dengan dukungan SDM yang profesional dan berkomitmen, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

3.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja

Realisasi capaian sasaran kinerja tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Batam berdasarkan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian penetapan/perjanjian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan 4 (empat) indikator kinerja:

1.1. *Indikator Program: Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat yang tersedia*

Capaian dari indikator kinerja sebesar 103% dimana realisasi 65% dari target 63%. Indikator kinerja program ini diukur dari jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan dikali 100%. Indikator Kinerja Program ini dengan tingkat capaian 103% jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia adalah sebanyak 3.564 unit dari target 3.471 unit. Ketercapaian pada indikator Program ini dinilai *sangat tinggi* dengan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dapat dibangun pada tahun 2025 berjumlah 454 unit dari 361 unit yang ditargetkan pada Renstra atau sebesar 126%, hal ini di akibat adanya peningkatan jumlah kebutuhan halte dan fasilitas keselamatan akibat dari adanya peningkatan beberapa ruas jalan di Kota Batam, sehingga penyediaan fasilitas keselamatan meningkat.

TABEL III.6
DATA PRASARANA KESELAMATAN YANG TELAH TERBANGUN
S.D TAHUN 2025

NAMA PRASARANA	s.d 2021	2022	2023	2024	2025	S.D 2025
Halte (Umum & Trans Batam)	84			2	10	96
Transfer Point	4		1			5
Rambu Lalin Standart Diametr 75	1468	50	100	182	280	2080
Rambu Lalin Parkir diameter 75	80	28	60		100	268
RPPJ	96	5	7		5	113
Rambu Type F	40	5			6	51
Papan Nama Jalan	807				50	857
Cermin Tikungan	37		10		0	47
Guardrail	3	1				4
APILL	38	1		1	3	43
JUMLAH	2657	90	178	185	454	3564

Indikator program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini menyediakan sarana dan prasarana perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Batam telah membangun Halte dan fasilitas keselamatan jalan berupa :

a. Pembangunan 10 unit Halte di Kota Batam, yaitu:

1. Halte Politeknik BatamD



Gambar 3.7. Halte Politeknik Batam (Pembangunan Tahun 2025)

2. Halte Pandawa



Gambar 3.8. Halte Pandawa (Pembangunan Tahun 2025)

3. Halte Bundaran Tembesi



Gambar 3.9. Halte Bundaran Tembesi (Pembangunan Tahun 2025)

4. Halte Puskopkar Batu Aji



Gambar 3.10. Halte Puskopkar (Pembangunan Tahun 2025)

5. Halte Base Camp



Gambar 3.11. Halte Base Camp (Pembangunan Tahun 2025)

6. Halte Bambu Kuning



Gambar 3.12. Halte Bambu Kuning (Pembangunan Tahun 2025)

7. Halte Putri Hijau Sagulung



Gambar 3.13. Halte Putri Hijau Sagulung (Pembangunan Tahun 2025)

8. Halte Plamo Garden



Gambar 3.14. Halte Plamo Garden (Pembangunan Tahun 2025)

9. Halte Batu Besar



Gambar 3.15. Halte Batu Besar (Pembangunan Tahun 2025)

10. Halte Sangrila Sekupang



Gambar 3.16. Halte Sangrila Sekupang (Pembangunan Tahun 2025)

b. Pembangunan Pedestrian di 2 (dua) Lokasi yaitu:

1. Bida Asri 1, Kel. Belian, Kec. Batam Kota sepanjang 179 m'



Gambar 3.17. Pedestrian Bida Asri 1 (Pembangunan Tahun 2025)

2. Bukit Kemuning, Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk sepanjang 76 m'



Gambar 3.18. Pedestrian Bukit Kemuning (Pembangunan Tahun 2025)

c. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 280 Unit di sejumlah titik ruas jalan di Kota Batam yaitu :

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu

“Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu”  sebanyak 70

unit yaitu 10 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony, 9 unit pada ruas jalan Perumahan Symphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa, 3 unit pada ruas jalan Simpang Panbil menuju Simpang KSquare (Jl. Ahmad Yani), 3 unit pada ruas jalan Simpang KSquare menuju Simpang Panbil (Jl. Ahmad Yani), 4 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Perumahan Rosedale (Jl. Laksamana Bintan), 4 unit pada ruas jalan Perumahan Rosedale menuju Simpang Frangky (Jl. Laksamana Bintan), 8 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Simpang Costa, 7 unit pada ruas jalan Simpang Costa menuju Simpang Frangky, 3 unit pada ruas jalan Simpang Gelael menuju Damkar Sungai Panas, 3 unit pada ruas jalan Damkar Sungai Panas menuju Simpang Gelael (Jl. Laksamana Bintan), 5 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 5 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah), 4 unit pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau, 2 unit pada ruang jalan Bengkong;

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Rambu Perintah Pilihan Memasuki Salah satu Jalur atau Lajur yang Ditunjuk”  sebanyak 8 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony, 3 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 4 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah);

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Rambu U-Turn”  sebanyak 47 unit yaitu 9 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Simphony, 7 unit pada ruas jalan Perumahan Simphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa, 3 unit pada ruas jalan Simpang Panbil menuju Simpang KSquare (Jl. Ahmad Yani), 3 unit pada ruas jalan Simpang KSquare menuju Simpang Panbil (Jl. Ahmad Yani), 4 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Perumahan Rosedale (Jl. Laksamana Bintan), 4 unit pada ruas jalan Perumahan Rosedale menuju Simpang Frangky (Jl. Laksamana Bintan), 1 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Simpang Costa, 1 unit pada ruas jalan Simpang Costa menuju Simpang Frangky, 3 unit pada ruas jalan Simpang Gelael menuju Damkar Sungai Panas, 3 unit pada ruas jalan Damkar Sungai Panas menuju Simpang Gelael (Jl. Laksamana Bintan), 4 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 4 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah), 1 unit pada ruang jalan Bengkong;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Rambu Panah Penunjuk Arah”  sebanyak 1 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Perintah Mengikuti Arah yang Ditunjukkan saat Memasuki Bundaran”  sebanyak 7 unit yaitu 3 unit pada ruas jalan Bundaran

Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 4 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah);

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor/*Forboden*”  sebanyak 81 unit yaitu 10 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Simphony, 9 unit pada ruas jalan Perumahan Simphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa, 3 unit pada ruas jalan Simpang Panbil menuju Simpang KSquare (Jl. Ahmad Yani), 3 unit pada ruas jalan Simpang KSquare menuju Simpang Panbil (Jl. Ahmad Yani), 4 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Perumahan Rosedale (Jl. Laksamana Bintan), 4 unit pada ruas jalan Perumahan Rosedale menuju Simpang Frangky (Jl. Laksamana Bintan), 8 unit pada ruas jalan Simpang Frangky menuju Simpang Costa, 7 unit pada ruas jalan Simpang Costa menuju Simpang Frangky, 3 unit pada ruas jalan Simpang Gelael menuju Damkar Sungai Panas, 3 unit pada ruas jalan Damkar Sungai Panas menuju Simpang Gelael (Jl. Laksamana Bintan), 8 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 9 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah), 8 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau, 2 unit pada ruang jalan Bengkong;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan hati-hati”  sebanyak 42 unit yaitu 7 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Simphony,

5 unit pada ruas jalan Perumahan Symphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa, 3 unit pada ruas jalan Simpang Panbil menuju Simpang KSquare (Jl. Ahmad Yani), 3 unit pada ruas jalan Simpang KSquare menuju Simpang Panbil (Jl. Ahmad Yani), 3 unit pada ruas jalan Simpang Gelael menuju Damkar Sungai Panas, 3 unit pada ruas jalan Damkar Sungai Panas menuju Simpang Gelael (Jl. Laksamana Bintan), 7 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 7 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah), 4 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau;

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Bundaran”  sebanyak 3 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 2 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah);
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Tikungan ke Kiri”  sebanyak 2 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony, 1 unit pada ruas jalan Perumahan Symphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Tikungan ke Kanan”  sebanyak 2 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony, 1 unit

pada ruas jalan Perumahan Symphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa;

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri”  sebanyak 5 unit yaitu 4 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah), 1 unit pada ruas jalan Simpang Batu Besar menuju Bundaran Kabil (Jl. Hang Tuah);
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Persimpangan Tiga Serong Kiri”  sebanyak 1 unit yaitu pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri”  sebanyak 1 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu Besar (Jl. Hang Tuah);
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Tanjakan Landai”  sebanyak 3 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Symphony, 2 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau;
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Turunan Landai”  sebanyak 4 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Perumahan Symphony menuju Simpang Kampung Tua Nongsa, 1 unit pada ruas jalan Bundaran Kabil menuju Simpang Batu

Besar (Jl. Hang Tuah), 2 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau;

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu “Peringatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas”  sebanyak 2 unit yaitu pada ruas jalan Simpang Kampung Tua Nongsa menuju Perumahan Simphony;
- Rambu Papan Tambahan  sebanyak 1 unit yaitu pada ruas jalan Polda Kepulauan Riau.



Gambar 3.19. Rambu Lalu Lintas Standar (Pembangunan Tahun 2025)

- d. Pemasangan rambu-rambu parkir sebanyak 100 Unit di sejumlah titik ruas jalan di Kota Batam yaitu :

TABEL III.7
LOKASI PEMBANGUNAN PAPAN NAMA JALAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

LOKASI PEMBANGUNAN PAPAN NAMA JALAN (PENGADAAN 2025)				
1. Jl Pembangunan	11. Jl Laksamana Bintan	21. Jl Gajah Mada	31. Jl Hang Kasturi	41. Jl Dr Haji Ibnu Sutowo
2. Jl Pembangunan	12. Jl Laksamana Bintan	22. Jl. R.E Martadinata	32. Jl Hasanuddin	42. Jl Dr Haji Ibnu Sutowo
3. Jl Imam Bonjol	13. Jl Laksamana Bintan	23. Jl. R.E Martadinata	33. Jl Hasanuddin	43. Jl Haji Engku Tua
4. Jl Imam Bonjol	14. Jl Jenderal Sudirman	24. Jl Hang Tuah	34. Jl Raja Isa	44. Jl Haji Engku Tua
5. Jl Teuku Umar	15. Jl Jenderal Sudirman	25. Jl Hang Tuah	35. Jl Raja Isa	45. Jl Raja M. Tahir
6. Jl Teuku Umar	16. Jl Jenderal Sudirman	26. Jl Hang Tuah	36. Jl Raja Isa	46. Jl Raja M. Tahir
7. Jl Yos Sudarso	17. Jl Jenderal Sudirman	27. Jl Hang Tuah	37. Jl Selasih	47. Jl Ahmad Yani
8. Jl Yos Sudarso	18. Jl Bunga Raya	28. Jl Hang Jebat	38. Jl Selasih	48. Jl Ahmad Yani
9. Jl Yos Sudarso	19. Jl Bunga Raya	29. Jl Hang Jebat	39. Jl Dang Merdu	49. Jl Raja Fisabilillah
10. Jl Laksamana Bintan	20. Jl Gajah Mada	30. Jl Hang Kasturi	40. Jl Dang Merdu	50. Jl Raja Fisabilillah



Gambar 3.20. Papan Nama Jalan (Pembangunan Tahun 2025)

- e. Pembangunan Rambu Type F sebanyak 6 unit di sejumlah titik ruas jalan di Kota Batam, yaitu: 3 unit di Jalan Hang Tuah dan 3 Unit di Jalan Sudirman.



Gambar 3.21. Rambu Type F (Pembangunan Tahun 2025)

- f. Pembangunan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) sebanyak 5 unit di Bundaran Punggur.



Gambar 3.22. Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) (Pembangunan Tahun 2025)

- g. Pembangunan Rambu Parkir sebanyak 100 unit di sejumlah titik ruas jalan di Kota Batam.

TABEL III.8
LOKASI PEMBANGUNAN RAMBU PARKIR TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

LOKASI PEMBANGUNAN RAMBU PARKIR (PENGADAAN 2025)			
1. Bumi Indah Sudi Mampir	26. Pasar Pujabahari	51. Morning Bakery Windsor	76. Nanyang Grand Orchid
2. Komp. Bumi indah (Depan Sarinah)	27. Depan Pasar Pujabahari	52. Apotik Kimia Farna 59	77. Bank Mandiri Palm Spring
3. Harum Manis Bumi Indah	28. Belakang Pasar Pujabahari	53. Kopi Awak Nagoya	78. Sate Kendal Hamidah
4. Bumi Indah Blok E	29. samping kanan 1 Pujabahari	54. Seraya Garden (The Hill)	79. Parkir Edukit BTC 1
5. Bumi Indah Blok E	30. samping kanan 2 Pujabahari	55. Seraya Apotik R24	80. Parkir Edukit BTC 2
6. Bumi Indah Blok E no 1 - 11	31. Depan Bank BCA Nagoya	56. Morning Bakery KBC	81. Parkir Bank BCA BTC 1
7. BRI Alam Raya	32. Depan Balison	57. RM Salero Basamo Puri Legenda	82. Parkir Bank BCA BTC 2
8. Komp. Nagoya Center	33. Samping Indorasa (Bank Riau)	58. Bank Riau Sei Panas	83. Holand Bakery BTC
9. Komp Sulaiman Nagoya (Bank Sumut)	34. Depan Martabak Har	59. Morning Bakery Sei Panas	84. Istimewa Yongkee BTC
10. Babinsa Nagoya	35. Samping Martabak Har	60. Air Mas / Grend Land 1	85. Soto Medan BTC
11. Hotel Dju Dju	36. Samping Martabak Har	5761. Air Mas / Grend Land 2	86. Ruko Komplek Tjap Nyonya
12. Bank OCBC Pelita	37. Komp. Citra Mas Penuin 1	62. Air Mas / Grend Land 3	87. Kopi Atok
13. Bank BTN Pelita	38. Komp. Citra Mas Penuin 2	63. Sunly Simpang Kuda 1	88. Royal Sincom 1
14. Komp Paradise 1	39. Komp. Citra Mas Penuin 3	64. Sunly Simpang Kuda 2	89. Royal Sincom 2
15. Komp Paradise 2	40. RM Sederhana Windsor	65. EXE Center Mie Tarempak Sei Panas	90. Royal Sincom 3
16. Apotik Budi Farna	41. Sakura Ampan Luky Plaza	66. Bank CIMB Sei Panas	91. RM Kandang Marbella
17. Apotik Sanitas	42. Pos Nagoya Hill	67. Bank BNI Sei Panas	92. D'D Kopi Marbela
18. Hotel Rezeki	43. Istimewa Yonkee	68. Komp. Mahkota Raya	93. Serba 7500 Marbela
19. Hotel Instar	44. Edukit Nagoya	69. Lab Prodia	94. Bank Mandiri Marbela
20. Seberang Hotel Formosa	45. Morning Bakery Jodoh	70. Apotik Jaya Farna	95. Tiban Center Kuliner
21. Top 100 Nagoya 1	46. Bank BRI Jodoh	71. Bank BSI Seruni	96. Tiban Center Kuliner
22. Top 100 Nagoya 2	47. Nagoya Siang Malam 1	72. Ruko Mitra Junction 1	97. Serba 8000 Tiban
23. Center Point Nagoya	48. Nagoya Siang Malam 2	73. Mitra Raya BTC 1	98. Pasar Sungai Harapan
24. Komp Villa Marina Blok B (RM Budi Mulya)	49. RM Podomoro	74. Mitra Raya BTC 2	99. Depan Bank Riau Tiban Impian
25. Bank BNI Pasar Pujabahari	50. BPR DANA Nagoya	75. Mitra Raya BTC 3	100. Kantor BPS Tiban Impian



Gambar 3.23. Rambu Parkir (Pembangunan Tahun 2025)

- h. Pembangunan Cansteen sepanjang 500 m' di Jalan Pemuda Depan SMAN 20 Kota Batam.



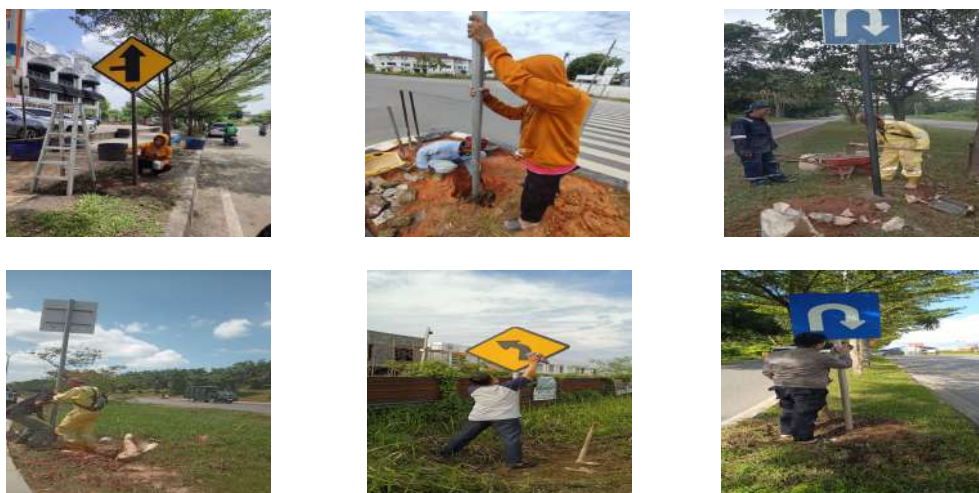
Gambar 3.24. Cansteen Depan SMAN 20 Jl. Pemuda (Pembangunan Tahun 2025)

- i. Pemeliharaan Prasarana Jalan terdiri dari pemeliharaan pada 1 (satu) unit Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di depan SMP 3 Jl. R.E Martadinata Kecamatan Sekupang Kota Batam, dan pemeliharaan 5 (lima) unit Halte.



Gambar 3.25. Pemeliharaan JPO Jalan R.E. Martadinata Kec. Sekupang(depan SMPN 3) Tahun 2025

- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari pemeliharaan rambu lalu lintas darat standar yang tersebar di Kota Batam sebanyak 50 unit dan pemeliharaan RPPJ sebanyak 5 unit yang ada di Kota Batam.



Gambar 3.26. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tahun 2025

2. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2025 meliputi :

- a. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sebanyak 3 (tiga) unit yang berlokasi:

1. SDN 008 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang



Gambar 3.27. ZoSS SDN 008 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang (Pembangunan Tahun 2025)

2. SDN 001 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang



Gambar 3.28. ZoSS SDN 001 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang (Pembangunan Tahun 2025)

3. SDN 011 Sei Binti Kecamatan Sagulung



Gambar 3.29. ZoSS SDN 011 Sei Binti Kec. Sagulung (Pembangunan Tahun 2025)

b. Pembangunan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) di 3 (tiga) Lokasi

1. Pembangunan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) 3 simpang di Simpang 3 KDA Dalam Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota



Gambar 3.30. APILL Simpang KDA Dalam (Pembangunan Tahun 2025)

2. Pembangunan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) 3 simpang di Simpang 3 Bundaran Nan Tongga, Kel. Sei Jodoh Kec. Batu Ampar



Gambar 3.31. APILL Simpang Nan Tongga (Pembangunan Tahun 2025)

3. Pembangunan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) 4 simpang di Simpang Panasonic Kel. Baloi Permai Kecamatan Batam Kota



Gambar 3.32. APILL Simpang Panasonic Batam Centre (Pembangunan Tahun 2025)

c. Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam sebanyak 39 Simpang di kota Batam, 32 Simpang sudah ATCS (Area Traffic Control System) dan 7 Simpang masih belum ATCS.

TABEL III.9
DATA DAN LOKASI APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) NON ATCS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

APILL NON-ATCS KOTA BATAM

No	Lokasi Simpang	No Simpang	Traffic Control				Tiang Octagonal Galvanis			UNIT LAMPU AC/DC													
			Jum	Jum SG	Tahun	Keterangan	Siku 7,5 M	Siku 4,5 M	Langkang 6M	Lurus	3 Asp 30 cm Sek Polos	3 Asp 30 cm Sek Panah	3 Asp 30 cm Primer Polos	3 Asp 30 cm primer panah	1 Asp 30 cm Primer Panah Hijau	2 Asp 20 cm Ped	3 Asp 20 cm Sek Polos	3 Asp 20 cm Sek Panah	3 Asp 20 cm Primer Polos	3 Asp 20 cm primer panah	2 Asp 20 cm Panah Kuning		
1	Aviari		1	8		UMC-690 AC				8									8				
2	Hill Top		1	8		UMC-690 AC			4	4						8			12				
3	KDA Dalam		1	8		UMC-690 AC				6									6				
4	Taiwan		1	8		12 V, UMC-690 DC				6									6				
5	Tanjung Uncang		1	8		UMC-690 AC			2	8									10				
6	Tobing		1	6		UMC-690 AC				6									6				
7	Nato		1	4		12 V, UMC-690 DC				4									4				
8	Bengkong harapan		1			-				6						6	-	-					Non Aktif
9	Bengkong Seken		1			-			2	2						3	6						Non Aktif
10	Citra Tubindo		1			-				6									6				Non Aktif
Total				50					0	6	42	0	0	0	0	0		0	0	52	0	0	0

TABEL III.10
DATA DAN LOKASI APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) ATCS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

APILL ATCS KOTA BATAM

No	Lokasi Simpang	No Simpang	Traffic Control			Tiang Octagonal Galvanis			UNIT LAMPU AC/DC															Kamer a Flow	Kamer a Dome		
			Jum	Jum SG	Tahun	Keterangan	Siku 7,5 M	Siku 4,5 M	Langkang 6M	Lurus	3 Asp 30 cm Hor Primer Polos	3 Asp 30 cm Hor Primer Panah	3 Asp 30 cm Sek Polos	3 Asp 30 cm Sek Primer Polos	3 Asp 30 cm Primer Polos	3 Asp 30 cm primer panah	1 Asp 30 cm Primer Panah Hijau	2 Asp 20 cm Ped	3 Asp 20 cm Sek Polos	3 Asp 20 cm Sek Panah	3 Asp 20 cm Primer Polos	3 Asp 20 cm primer panah	2 Asp 20 cm Sek Kuning				2 Asp 30 cm Panah Kuning
1	Balai Center	1	1	8	2017	12 V, UMC-690 DC	4			7					4			3			8					1	APBN
2	Indo Mobil	2	1	8	2009	24 V, UMC-690 DC	3			3	2	1		1	3	3		6								1	APBN
3	JAM	3	1	8	2009	24 V, UMC-690 DC	4			6				1	10	5									2		APBN
4	BNI/Basedale	4	1	8	2017	24 V, UMC-690 DC	4			4	4	2			5	3		8								1	APBD
5	Apt. Harmoni	5	1	8	2010	12 V, UMC-690 DC		2	5				1				1	4		1	2	2		1		1	APBD
6	Lippo Bank	6	1	8	2010	12 V, UMC-690 DC	4			4			1	2	10	6		8								1	APBD
7	Mc Donald & Planet Holiday	7	1	8	2016	24 V, UMC-690 DC	6			6			3	18	12			6							3		APBD
8	Kabil	8	1	8	2010	24 V, UMC-690 DC			4	8	8	2	8	10	2										4	1	APBNP-2020
9	Kara	9	1	8	2010	12 V, UMC-690 DC			2	8			2							8						1	APBN
10	Frangley	10	1	8	2012	12 V, UMC-690 DC			2	8			2								8					1	APBN
11	Masjid Raya	11	1	8	2012	12 V, UMC-690 DC			4	6					4					6						1	APBN
12	Collecta	12	1	8	2019	12 V, UMC-690 DC			2	6			2	1						6						1	APBD
13	Puri Garden / The Hill	13	1	8	2012	12 V, UMC-690 DC	3			4				2	5	5		6					1			1	APBD
14	Virgo	14	1	8	2017	24 V, UMC-690 DC	3			4	2	2	2	1	2	2		6								1	APBD
15	Panbil	16	1	8	2010	12 V, UMC-690 DC		3	6				3	1	4	3		6								1	APBD-P
16	Seraya Atas	17	1	8	2017	24 V, UMC-690 DC		3		2	2	1	2	1	3	1		4							2	1	APBD
17	KDA	18	1	8	2012	12 V, UMC-690 DC	3			3			2	1	9											1	APBN
18	Bank Indonesia	19	1	8	2014	24 V, UMC-690 DC	4	4						2	10	2		8								1	APBN
19	Ikan Daun	20	1	8	2014	24 V, UMC-690 DC	3	5					2	9	2		8									2	APBN
20	Barelang	21	1	8	2015	24 V, UMC-690 DC	2	1		3							9	1	6			1		2		2	APBN
21	Sei-Beduk	22	1	8	2015	24 V, UMC-690 DC	2			6				8	2		8								2		APBN
22	Basecamp	23	1	8	2015	24 V, UMC-690 DC	3	1		4				12	2		8								1		APBN
23	Batu Ampar	24	1	8	2017	24 V, UMC-690 DC	4			4	4			8			8								2		APBD
24	Telkom Pelta	25	1	8	2019	24 V, UMC-690 DC	3			4																1	APBD
25	Kalata	26	1	8	2017	24 V, UMC-690 DC	4			4	4				8			8							2	1	APBD
26	Sei Harapan	27	1	8	2020	24 V, UMC-690 DC	4			4	4	4	4	4	4										4	1	APBNP-2020
27	Batu Besar	29	1	8	2020	24 V, UMC-690 DC	3			3	3	3	3	3	3											1	APBNP-2020
28	Man Sagulung/Panindo	30	1	8	2021	24 V, UMC-690 DC	3			4	4	4	4	4	4										3	1	APBD
29	Frida	31	1	8	2022	24 V, UMC-690 DC	3			4	4	4	4	4	4										3	1	APBD
30	Panasonic	32	1	8	2025	23 V, UMC-690 DC	4			4	4	4	4	4	4	4									4	1	APBD
31	KDA Dalam	33	1	8	2025	24 V, UMC-690 DC	3			4	3	1		1	4	2									3	1	APBD
32	Namlongga	34	1	8	2025	24 V, UMC-690 DC	3			4	3	1		1	4	2									3	1	APBD
Total			32				82	5	28	138	55	8	47	14	180	51	1	111	-	1	30	10	1	1	1	41	26

Data per Desember 2025 dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Batam

d. Pengecatan Marka sepanjang 25.000 m² yaitu di lokasi:

TABEL III.11
LOKASI PENGECATAN MARKA JALAN TAHUN 2025 (M²)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

JENIS MARKA	LOKASI	VOLUME
Marka Jalan Putus-putus (Putih)	Simpang Jam -Simpang Gelael (Jln. Gajah Mada - Jln. Raja Fisabilillah)	518,7
	Simpang Gelael -Bundaran Tuah Madani (Jl.Raja Fisabilillah-Jl.Engku Putri)	473,63
	Flyover Laluan Mandani - Simpang Indomobil	214,85
	Ruas Jalan sekitar Engku Putri	150,89
	Simpang Polsek Lubuk Baja - Simpang Apartemen Harmoni (Jl.Raden Patah - Jl.Imam Bonjol)	214,2
	Simpang Irinco - Simpang The Hill Hotel (Jl. Teuku Umar)	146,61
	Simpang Telkom Pelita - Underpass Pelita (Jl. Sriwijaya)	142,2
	Bundaran Madani - Simpang Bank Indonesia (Jl. Fisabilillah - Jl. Engku Putri)	180
MARKA LAJUR SEPEDA MOTOR (Garis putus - putus Warna Putih)	Simpang PJR - Flyoffer Laluan Madani	1.194,00
MARKA LAJUR SEPEDA MOTOR (Garis Utuh/Solid Line Warna Kuning)	Simpang PJR - Flyoffer Laluan Madani	4.408,80
MARKA LAJUR SEPEDA MOTOR (Marka Lambang Sepeda Motor)	Simpang PJR - Flyoffer Laluan Madani	310,44
MARKA LAJUR SEPEDA MOTOR (Marka Garis putus-putus Warna Kuning)	Simpang PJR - Flyoffer Laluan Madani	346,15
Marka Garis Utuh/Solid Line (Warna Kuning)	Simpang Jam -Simpang Gelael (Jln. Gajah Mada - Jln. Raja Fisabilillah)	730,94
	Simpang Gelael -Bundaran Tuah Madani (Jl.Raja Fisabilillah-Jl.Engku Putri)	702,39
Marka Garis Utuh/Solid Line (Warna Putih)	Kantor POLRESTA Bareleng	182,4
Marka Zebra Cross	Simpang Jam -Simpang Gelael (Jln. Gajah Mada - Jln. Raja Fisabilillah)	57,9
	Simpang Gelael - Bundaran Tuah Madani (Jl.Raja Fisabilillah-Jl.Engku Putri)	119,01
	Simpang Indo Mobil (Jl.Yos Sudarso-Jl.Sudirman)	158,37
	Politeknik	43,25
	Jl.Raden Patah	26
	Mall Botania 2	17,13
	Jl.Tengku Sulung	17,5
	Kantor POLDA Kepri	19,5

JENIS MARKA	LOKASI	VOLUME
Marka Zebra Cross	Flyover Laluan Mandani	162
	Simpang Gelael	35,16
	Simpang Batu Besar	176,7
	Simpang KDA Luar	145,19
	Simpang ONE MALL Batam Centre	146,7
	Simpang Bank Indonesia Batam Centre	43,8
	Simpang Irinco	128,49
	Simpang Telkom Pelita	113,67
	Simpang Nan Tongga	113,04
	Simpang Kepri Mall (Ksquare)	210,45
	Simpang Masjid Agung Batam	133,97
	Simpang KDA Dalam	107,42
Marka Kuning Persimpangan	Simpang Gelael -Bundaran Tuah Madani (Jl.Raja Fisabilillah-Jl.Engku Putri)	74,4
Marka Jalan STA 0+000 - 1+355	Simpang Jl. Pahlawan - Jl. Suprpto Batu Aji (Jl.Suprpto)	60,75
Marka Garis Utuh/Solid Line (Warna Kuning) tepi luar dan tepi dalam	Simpang PJR Batu Besar - Simpang Indomobil	6.947,87
	Simpang Masjid Agung Batam - Simpang Kepri Mall (Ksquare) Jl. Ahmad Yani	1.526,40
	Ruas Jalan sekitar Engku Putri	804,72
	Simpang Polsek Lubuk Baja - Simpang Apartemen Harmoni (Jl.Raden Patah - Jl.Imam Bonjol)	643,2
	Simpang Irinco - Simpang The Hill Hotel (Jl. Teuku Umar)	545,76
	Simpang Telkom Pelita - Underpass Pelita (Jl. Sriwijaya)	379,2
	Bundaran Madani - Simpang Bank Indonesia (Jl. Fisailillah - Jl. Engku Putri)	802,08
Marka Garis (Warna Putih)	Kantor POLDA Kepri	811,63
Marka Parkir (Warna Kuning)	Kantor POLDA Kepri	38,93
Marka Parkir (Warna Putih)	Kantor POLRESTA Bareleng	68,52
Marka dilarang parkir (Warna Kuning)	Kantor POLRESTA Bareleng	1,92
Marka Kotak Kuning	Kantor POLRESTA Bareleng	4,08
	Flyover Laluan Mandani	78
	Simpang KDA Luar	66,6
	Simpang Kepri Mall	72
	Simpang KDA Dalam	48,6

JENIS MARKA	LOKASI	VOLUME
Marka Lambang Panah	Flyover Laluan Mandani	19,4
	Simpang Batu Besar	20,9
Marka Pulau	Flyover Laluan Mandani	45,46
Marka Lambang Panah	Simpang KDA Luar	14,2
	Simpang Kepri Mall	22,95
	Simpang KDA Dalam	10,95



Gambar 3.33. Pengecatan Marka Jalan Tahun 2025

e. Pengecatan Pita Penggaduuh sepanjang 344 m² yaitu di lokasi:

TABEL III.12
LOKASI PENGECATAN PITA PENGGADUHU TAHUN 2025 (M²)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

LOKASI	VOLUME
Seberang Kantor Polda Kepri	51
Bukit Kemuning Tanjung Piayu	34,2
Perumahan Citra Batam	22,8
Gereja HKBP Legenda Malaka	15,5
Depan SDN 006 Batam Kota	38,34
Gereja HKBP Resort Mahanaim	32,16
Sekolah Global Indo Asia	51
SMP 40 Batam	21
SMP 16 Batam	10,5
Bukit Kemuning	21
Tiban	26,25
Dishub	9,75
Sei Harapan	10,5



Gambar 3.34. Pengecatan Pita Penggadu Kota Batam Tahun 2025

1.2. Indikator Program: Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Capaian indikator kinerja program pengelolaan retribusi parkir pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Indikator ini diukur berdasarkan persentase peningkatan pendapatan retribusi parkir tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu selisih pendapatan retribusi parkir tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya, dibagi pendapatan tahun berjalan, kemudian dikalikan 100%.

Pada akhir Tahun 2025, realisasi pendapatan retribusi parkir tercatat sebesar Rp15.062.874.848,- sedangkan pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp11.218.361.227,- sehingga terjadi peningkatan sebesar 34%. Target peningkatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 5%, sehingga capaian kinerja terhadap target indikator mencapai 680%.

Meskipun capaian indikator menunjukkan persentase yang sangat tinggi, realisasi pendapatan tersebut masih belum memenuhi target pendapatan retribusi parkir sebagaimana ditetapkan dalam APBD Perubahan Kota Batam Tahun 2025 sebesar Rp20.000.000.000,-. Oleh karena itu, diperlukan upaya

yang lebih optimal dan terstruktur dari UPTD Parkir bersama Dinas Perhubungan Kota Batam untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, termasuk penguatan pengawasan, optimalisasi potensi titik parkir, serta peningkatan sistem pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel. Komitmen dan dukungan pimpinan daerah juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik.

Berdasarkan data UPTD Parkir per Desember 2025, jumlah titik lokasi parkir tercatat sebanyak 765 lokasi, yang terdiri dari 584 lokasi parkir tepi jalan umum (on the street) dan 181 lokasi parkir mandiri, dengan jumlah juru parkir aktif sebanyak 536 orang.

Indikator program ini turut didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan indikator kinerja berupa jumlah penambahan Satuan Ruang Parkir (SRP) baru. Pada Tahun 2025 ditargetkan penambahan sebanyak 1.147 SRP, dengan realisasi sebesar 593 SRP atau mencapai 52%. Capaian tersebut belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan sejumlah lokasi parkir tepi jalan umum menjadi lokasi parkir khusus/mandiri;
2. Beberapa titik parkir tepi jalan umum yang sudah tidak dapat lagi dilakukan pemungutan retribusi;
3. Adanya pelebaran jalan di beberapa titik yang berdampak pada berkurangnya kapasitas SRP.

Kondisi tersebut mendorong Dinas Perhubungan Kota Batam untuk secara rutin melibatkan tenaga ahli dan tim teknis dalam melakukan survei potensi

titik parkir baru guna meningkatkan jumlah SRP serta mengoptimalkan pendapatan retribusi parkir secara berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pendapatan retribusi parkir antara lain:

1. Penurunan jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) akibat pelebaran jalan dan penataan lalu lintas yang mengurangi kapasitas parkir tepi jalan umum.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian di lapangan, termasuk potensi kebocoran penerimaan dan ketidaktertiban pengelolaan oleh juru parkir.
3. Sistem pengelolaan parkir yang masih konvensional di beberapa titik, sehingga belum sepenuhnya mendukung transparansi dan akuntabilitas penerimaan.
4. Pertumbuhan kawasan usaha dan pusat aktivitas baru yang belum seluruhnya terpetakan sebagai potensi titik parkir resmi.

Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi Pendataan dan Pemetaan Potensi Parkir dengan melakukan survei dan kajian komprehensif secara berkala untuk mengidentifikasi titik-titik parkir potensial, khususnya pada kawasan perdagangan, jasa, dan pusat pertumbuhan baru.
2. Digitalisasi Sistem Pengelolaan Parkir untuk mendorong penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) atau non-tunai guna meningkatkan transparansi, meminimalisir kebocoran, dan meningkatkan akurasi pelaporan pendapatan.

3. Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Juru Parkir dengan melakukan pembinaan rutin, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan terpadu guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Evaluasi Kebijakan Penetapan Target dengan melakukan kajian yang lebih realistis dan berbasis potensi dalam menetapkan target pendapatan retribusi parkir, sehingga selaras dengan kondisi lapangan.
5. Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Pimpinan Daerah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penataan kawasan dan kebijakan transportasi, sehingga pengelolaan parkir menjadi bagian dari sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pengelolaan parkir di Kota Batam dapat semakin profesional, transparan, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung tertib lalu lintas dan penataan ruang kota yang berkelanjutan.

1.3. Indikator Program: Persentase angkutan barang dan angkutan penumpang umum yang lulus uji KIR

Capaian dari indikator kinerja sebesar 95% dimana realisasi 47% dari target 50%. Indikator kinerja program ini diukur dari jumlah kendaraan umum yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan umum yang wajib uji dikali 100%.

Ketercapaian pada indikator Program ini dinilai *sangat tinggi* dengan jumlah kendaraan umum yang lulus uji sebanyak 14.800 unit dari 31.214 unit kendaraan yang wajib uji, dengan target kendaraan yang lulus uji sebanyak 15.486 unit.

TABEL III.13
DATA KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI TAHUN 2025

Jenis Kendaraan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Taksi	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- Umum	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2. Oplet	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
- Umum	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655
3. Bis	2.710	2.738	2.744	2.759	2.783	2.802	2.814	2.828	2.839	2.859	2.865	2.874
- Umum	1.014	1.018	1.020	1.026	1.026	1.034	1.034	1.033	1.034	1.036	1.036	1.040
- Bukan Umum	1.602	1.626	1.630	1.639	1.663	1.674	1.685	1.700	1.710	1.728	1.734	1.739
- Pemerintah	94	94	94	94	94	94	95	95	95	95	95	95
4. Kend. Barang	23.902	23.993	24.080	24.161	24.271	24.368	24.536	24.650	24.748	24.854	24.968	25.052
- Umum	974	978	1.003	1.004	1.011	1.015	1.032	1.044	1.055	1.059	1.081	1.085
- Bukan Umum	22.206	22.293	22.355	22.435	22.534	22.622	22.768	22.870	22.939	23.041	23.133	23.213
- Pemerintah	722	722	722	722	726	731	736	736	754	754	754	754
5. Truck Tempelan	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
- Umum	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
- Bukan Umum	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
- Pemerintah												
Jumlah	29.898	30.017	30.110	30.206	30.340	30.456	30.638	30.766	30.875	31.001	31.121	31.214

TABEL III.14
DATA KENDARAAN LULUS UJI DI PENGUJIAN KENDARAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TAHUN 2025

NO	BULAN	MOBIL BARANG				KERETA		KERETA		MOBIL BUS				MOBIL ANGKUTAN				KHUSUS		PENUMPANG		TOTAL
		2 SUMBU		> 2 SUMBU		GANDENGAN		TEMPELAN		BUS		MIKROBUS		TAKSI		OPLET						
		U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU			
1	JANUARI	29	827	76	104	0	0	1	21	21	70	1	20	46	1	0	0	0	0	0	1	1.217
2	FEBRUARI	42	875	71	87	0	0	1	16	23	61	1	21	35	0	0	0	0	1	1	1	1.236
3	MARET	37	775	63	77	0	0	0	17	36	55	1	17	14	0	0	0	0	0	1	2	1.095
4	APRIL	24	769	30	72	0	0	0	19	25	27	2	9	23	1	1	0	0	1	0	0	1.003
5	MEI	31	893	69	91	0	0	1	30	13	57	2	17	50	3	0	0	0	0	0	0	1.257
6	JUNI	47	946	71	126	0	0	0	13	22	51	1	18	14	0	0	0	0	1	1	1	1.312
7	JULI	50	1.101	75	109	0	0	2	22	20	79	2	18	50	1	0	0	0	3	0	0	1.532
8	AGUSTUS	47	859	68	96	0	0	1	21	20	62	1	15	30	1	0	1	0	2	2	0	1.226
9	SEPTEMBER	41	847	70	74	0	0	0	11	23	64	0	13	11	0	0	0	0	1	0	4	1.159
10	OKTOBER	37	912	36	78	0	0	0	22	37	51	3	21	53	2	0	0	0	1	1	5	1.259
11	NOVEMBER	32	820	96	102	0	0	0	21	17	55	1	14	44	0	0	0	0	0	0	0	1.202
12	DESEMBER	53	887	70	144	0	0	1	19	28	50	0	17	29	2	1	0	0	1	0	0	1.302
TOTAL		470	10.511	795	1.160	0	0	7	232	285	682	15	200	399	11	2	1	0	11	6	13	14.800



Gambar 3.35. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Batam

Ketercapaian pada indikator Program ini masih belum memenuhi pencapaian yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya pemilik kendaraan wajib uji (kendaraan penumpang dan barang) yang masih kurang kesadaraannya untuk melakukan uji *keur* kendaraannya.

Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan setiap hari kerja di Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap kendaraan wajib uji yaitu kendaraan angkutan orang dan barang yang bertujuan untuk keselamatan pengguna jalan. Pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh tim pengujian Dinas Perhubungan yaitu uji emisi gas buang, pemeriksaan bagian bawah kendaraan, uji daya pancar lampu, uji kincup roda depan, uji sistem pengereman, uji akurasi alat penunjuk kecepatan.

Beberapa dampak dari tidak dilakukannya pengujian kendaraan bermotor:

- a. Risiko kecelakaan meningkat karena kondisi kendaraan (rem, lampu, ban kemudi, emisi dll) tidak terkontrol;
- b. Kerusakan komponen tidak terdeteksi dini, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal;
- c. Menurunnya standar keselamatan dan kenyamanan angkutan umum;
- d. Membahayakan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya.
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan.

Untuk mencapai indikator program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu:

1. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini melaksanakan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Bidang Angkutan, yang terdiri dari :

- a. Pengadaan Bukti Lulus Uji berupa *BLUe Card* (kartu Bukti Lulus Uji Elektronik) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan sebanyak 5.600 set.



Gambar 3.36. Kartu bukti lulus uji elektronik (*BLUe Card*)

- b. Pemeliharaan alat uji dan kalibrasi kendaraan bermotor dan Sistem e-PKB. Pemeliharaan peralatan uji dilaksanakan oleh pengelola UPUBKB melalui petugas teknis yang memiliki kompetensi, serta dapat bekerja sama dengan penyedia/vendor resmi peralatan. Kegiatan pemeliharaan meliputi pembersihan dan pemeriksaan rutin, pengecekan fungsi komponen mekanik dan elektronik, pelumasan bagian bergerak, pemeriksaan sistem kelistrikan, pembaruan perangkat lunak (software), serta penggantian suku cadang yang mengalami keausan. Seluruh kegiatan pemeliharaan didokumentasikan dalam logbook sebagai bentuk pengendalian internal dan bahan evaluasi berkala.

Adapun kalibrasi peralatan uji dilaksanakan oleh laboratorium kalibrasi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai standar ISO/IEC 17025. Kalibrasi dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tingkat akurasi alat uji tetap sesuai dengan standar nasional. Hasil kalibrasi dituangkan dalam sertifikat kalibrasi resmi yang menjadi dasar legalitas operasional peralatan uji.

Pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi secara konsisten merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengujian kendaraan bermotor. Selain menjamin keabsahan hasil uji, langkah ini juga mendukung terciptanya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meminimalisir potensi temuan dalam pemeriksaan pengawasan internal maupun eksternal.

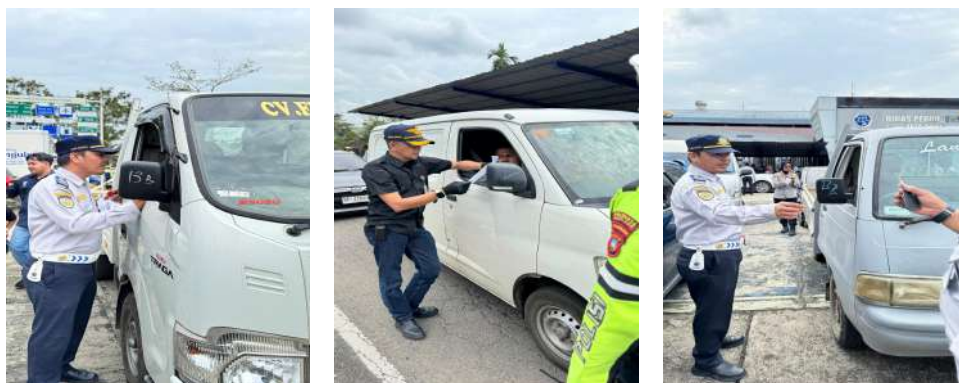


Gambar 3.37. Pelaksanaan pemeliharaan alat uji kendaraan dan kalibrasi

2. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Kegiatan ini melaksanakan razia kendaraan wajib uji dengan melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang diwajibkan menjalani uji berkala (uji KIR), guna memastikan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya. Razia dilaksanakan secara terpadu oleh PPNS Dinas Perhubungan dan petugas teknis, Kepolisian (Satlantas), unsur TNI atau instansi lain yang terkait (BPTD). Dalam kegiatan razia, dilakukan pemeriksaan terhadap bukti lulus uji berkala (*blue card*), masa berlaku uji berkala, kesesuaian identitas kendaraan, kondisi teknis kendaraan (ban, lampu, rem, muatan berlebih dan lain-lain). Pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan tilang oleh Kepolisian, rekomendasi tidak boleh beroperasi sampai melakukan uji kir, penahanan sementara kendaraan (sesuai kewenangan)

Tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan 16 kali Razia dan 16 kali pengawasan ketertiban lalu lintas.



Gambar 3.38. Pelaksanaan razia kendaraan angkutan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kota Bata

1.4. Indikator Program: *Persentase peningkatan jumlah penumpang transportasi darat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan (Trans Batam)*

Capaian dari indikator kinerja sebesar 86% dimana realisasi 8,6% dari target 10%. Ketercapaian pada indikator Program ini dinilai *tinggi* dengan membandingkan jumlah penumpang Trans Batam tahun berjalan dikurangi jumlah penumpang Trans Batam tahun sebelumnya dibagi jumlah penumpang Trans Batam tahun sebelumnya dikali 100%. Jumlah penumpang Trans Batam selama tahun 2025 tercatat sebesar 1.808.377 penumpang sedangkan pada Tahun 2024 sebesar 1.665.192 penumpang, terjadi peningkatan sebesar 8,6%. Target peningkatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar 10%, sehingga capaian kinerja terhadap target indikator mencapai 86%.

Indikator program ini didukung oleh kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang selama tahun 2025 melaksanakan operasional Bus Trans Batam di Kota Batam dan Bus Sekolah untuk siswa-siswi di wilayah hinterland.

- a. Pengelolaan Bus Trans Batam dan Bus Sekolah sejak Desember 2013 dikelola oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi, berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 30 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pembentukan UPT Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

Untuk tahun 2025 jumlah Bus Trans Batam yang beroperasi melayani masyarakat untuk 9 (sembilan) koridor adalah sebanyak 50 unit, dengan rute sebagai berikut :

1. Koridor Sekupang – Batam Centre yang melewati Sei Harapan –

Tiban - UIB - Simp. Sei Panas - Kantor Walikota - Mega Mall

2. Koridor Tanjung Uncang – Batam Centre yang melewati Simpang Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Batu Aji - Simpang Bareleng - Muka Kuning - Kepri Mall - Kantor Walikota - Mega Mall
3. Koridor Sekupang – Jodoh yang melewati Sei Harapan - Tiban - UIB - Simp. Baloi - Penuin - Nagoya - Simp. Mc Donald - Terminal Jodoh - DC Mall - Pasar Induk
4. Koridor Sagulung – Sekupang yang melewati Pelabuhan Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Marina - Tanjung Riau - Sei Harapan
5. Koridor Tanjung Piayu – Batam Centre yang melewati Piayu Laut - Simpang Bagan - Muka Kuning - Panbil - Kepri Mall - Kantor Walikota
6. Koridor Jodoh – Batam Centre yang melewati Harbourbay - Batu Ampar - Sei Panas – BNI
7. Koridor Nongsa – Batam Centre yang melewati Teluk Mata Ikan - Kapling Sambau - Simpang Batu Besar - Simpang Bandara - SMU3 - Simpang Dotamana - Simpang Kantor Camat Kota Batam - Simpang KDA - Mega Mall
8. Koridor Nongsa – Jodoh yang melewati Batu Besar - Sudirman - Raden Patah - Nagoya Hill
9. Koridor Punggur – Nongsa yang melewati Punggur – Kabil – Sambal – Teluk Mata Ikan

Waktu tunggu antar Bus berada pada durasi 10 menit sampai dengan 30 menit.

Untuk mewujudkan Transportasi Kota yang aman, nyaman dan modern Dinas Perhubungan Kota Batam mulai 1 Januari 2024 UPTD Trans Batam bekerjasama dengan pihak ketiga melaksanakan skema *Buy The Service* (BTS):

TABEL III.15
DATA BUS TRANS BATAM DENGAN POLA *BY THE SERVICE*
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NAMA PIHAK KE TIGA	KORIDOR	UNIT	FOTO
PT. BAGONG DKK	Koridor 1 (Sekupang - Batam Centre)	7	
PT. BAGONG DKK	Koridor 2 (Tg. Uncang - Batam Centre)	7	
PT. BAGONG DKK	Koridor 3 (Sekupang - Jodoh)	6	
PT. BAGONG DKK	Koridor 4 (Sagulung - Sekupang)	6	
PT. KORONA TRANS PUNGGUR	Koridor 8 (Punggur - Jodoh)	7	
TOTAL		33	

b. Selama Tahun 2025 pelayanan bus sekolah telah mengangkut sebanyak 258.154 siswa yang tersebar di Kecamatan Galang. Bus Sekolah yang tersedia di UPTD Pelayanan Transportasi sebanyak 9 Unit untuk melayani 8 (delapan) Rute sebagai berikut:

1. Rute I : Dishub - Tembesi - Sijantung - Pulau Nguan - Air Lingka –Tanjung Kertang
2. Rute II : Dishub - Tembesi - Kampung Baru – Tanjung Kertang

3. Rute III: Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Sembulang – Sijantung
4. Rute IV: Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Cate – Tanjung Kertang
5. Rute V : Dishub - Tembesi - Setokok – Sijantung
6. Rute VI: Dishub - Tembesi – Tanjung Kertang - Monggak – Sijantung
7. Rute VII: Dishub - Dapur 6 – Tanjung Banun - Sei Buluh – Sijantung
8. Rute VIII: Dishub - Tembesi - Sijantung – Tanjung Kertang

Saat ini kondisi Bus Sekolah yang berjumlah 9 (Sembilan) unit keluaran tahun 2004 sudah tidak layak kondisinya dan jumlah muatan Bus Sekolah saat ini sudah mencapai *overload capacity*, sehingga dapat membahayakan penumpang dan petugas.

Pada APBD Perubahan tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Batam, mengadakan 4 (empat) unit bus sekolah untuk peremajaan bus yang sudah tidak layak jalan.



Gambar 3.39. Bus Sekolah Pengadaan Tahun 2025

2. PROGRAM Pengelolaan Pelayaran

Dengan 2 (dua) indikator kinerja:

2.1. Indikator Program: Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang tersedia pada tahun berjalan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 100%, dengan realisasi sebesar 69% dari target yang telah ditetapkan sebesar 69%. Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia dengan jumlah sarana dan prasarana laut yang dibutuhkan, kemudian dikalikan 100 persen. Dengan demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target penyediaan sarana dan prasarana perhubungan laut yang direncanakan pada tahun berjalan telah terealisasi secara optimal sesuai dengan perencanaan.

Target kinerja tahun 2025 sebesar 69% ditetapkan berdasarkan rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut secara bertahap selama periode Renstra. Dari total kebutuhan sebanyak 55 unit yang direncanakan tersedia pada akhir masa Renstra, pada tahun 2025 ditargetkan telah tersedia 38 unit. Dengan terealisasinya seluruh 38 unit tersebut, maka target tahunan dapat dicapai sepenuhnya.

Adapun sarana dan prasarana perhubungan laut yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2025 meliputi 1 unit Pelabuhan Pengumpan Sekupang, yang berperan sebagai simpul konektivitas angkutan laut; 20 unit dermaga yang tersebar untuk menunjang aktivitas naik turun penumpang dan distribusi barang; 10 unit ponton sebagai fasilitas tambat dan pendukung operasional pelabuhan; 1 unit kapal penumpang umum antar pulau; 3 unit speed boat penumpang umum antar pulau yang melayani mobilitas masyarakat

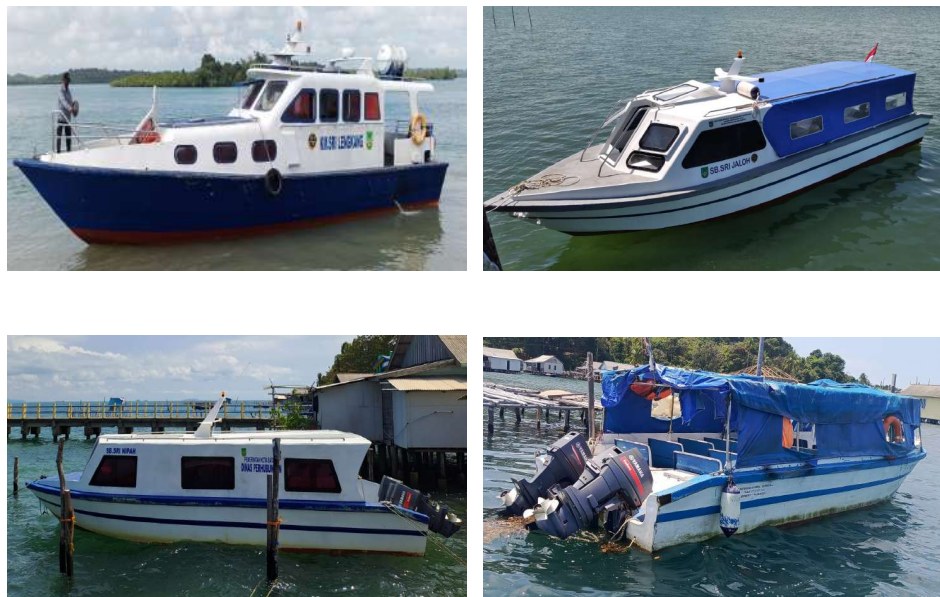
secara lebih cepat; serta 3 unit kapal anak sekolah wilayah hinterland yang secara khusus mendukung aksesibilitas pendidikan bagi pelajar di wilayah kepulauan.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya bagi masyarakat di daerah hinterland yang sangat bergantung pada transportasi laut. Selain mendukung mobilitas penumpang dan distribusi logistik, penyediaan fasilitas ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir dan kepulauan. Dengan capaian ini, Dinas Perhubungan Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang efektif dan konsisten dalam merealisasikan target pembangunan sektor perhubungan laut sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Indikator program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pelayanan Transportasi yang melaksanakan operasional angkutan laut untuk masyarakat dan anak sekolah di wilayah hinterland.
 - a. Transportasi laut yang tersedia untuk masyarakat sebanyak 1 unit Kapal (KM Sri Lenggang) dan 3 unit Speed Boat (Sri Jaloh, Sri Mecan dan Sri Nipah), yang beroperasi seminggu selama 3 (tiga) hari yaitu pada Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute sebagai berikut :

1. Rute KM Sri Lenggang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek
- Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk
Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air
Lingke
4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang



Gambar 3.40. Angkutan umum wilayah hinterland dibawah Dinas Perhubungan Kota Batam

- b. Transportasi anak sekolah wilayah hinterland , sarana transportasi laut yang beroperasi merupakan hibah dari Kementerian Sosial pada bulan November 2024 berupa 3 unit kapal penumpang berkapasitas 20 orang dengan maksimal daya angkut 40 orang per kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut anak sekolah diwilayah hinterland, dengan rute:

Rute 1 : Pulau Gara - Pulau Lingka - Pulau Bertam

Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Pulau Gara – Pulau Bertam – Pulau Lingka – Pulau Gara

Rute 2 : Pulau Mecan - Pulau Sarang - Pulau Lenggang - Pulau Sambu
- Belakang Padang

Belakang Padang – Pulau Sarang – Pulau Mecan – Pulau
Sarang – Pulau Mecan

Pulau Mecan – Belakang Padang – Pulau Sambu – Pulau
Lenggang – Pulau Sarang – Pulau Mecan

Rute 3 : Pulau Terong – Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting - Pulau Tumbar – Pulau Geranting

Pulau Geranting – Pulau Tumbar – Pulau Terong



Gambar 3.41. Kapal angkutan anak sekolah (Hibah dari Kementerian Sosial Tahun 2023)

2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Kegiatan ini melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan dermaga beton dan dermaga ponton. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan melaksanakan pemeliharaan 3 (empat) unit dermaga dan 1 (satu) unit dermaga ponton yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Bulang. Data pelaksanaan pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.16
DATA PEMELIHARAAN DERMAGA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO.	NAMA PELABUHAN	ITEM PEKERJAAN	DOKUMENTASI PELABUHAN
1.	Dermaga Rakyat Pulau Puteri Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa	1. Perbaikan Pagar Pelantar dan dermaga 2. Penggantian Tiang dan Atap 3. Pesangan Lampu penerangan 2 Unit 4. Pengecatan Tiang dan pagar 5. Perbaikan lantai Dermaga 6. Pemasangan Papan Nama Dermaga	
2.	Dermaga Ponton Pulau Buluh Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang	1. Perbaikan Gang way Ponton 2. Pengecatan Tiang dan Pagar 3. Pengaspalan Lantai Ponton 4. Penggantian Atap Gang way	
3	Dermaga Rakyat Pulau Terong Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakang Padang	1. Perbaikan Tangga Dermaga 2. Pemasangan Lampu penerangan 2 Unit 3. Pengecatan Castin di dermaga	
4	Dermaga Rakyat Pulau Temoyong Kelurahan Temoyong Kecamatan Bulang	1. Perbaikan Tiang dan Atap 2. Perbaikan Tangga dermaga 3. Pengecatan Tiang dan Pagar 4. Perbaikan Papan Nama Dermaga	

2.2. Indikator Program: Persentase peningkatan jumlah penumpang Transportasi Laut yang dilayani oleh Dinas Perhubungan

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu sebesar 113%, dengan realisasi peningkatan mencapai 147% dari target yang telah ditetapkan sebesar 130%. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase selisih jumlah penumpang tahun berjalan terhadap jumlah

penumpang tahun sebelumnya, dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100%.

Penetapan target peningkatan sebesar 130% didasarkan pada adanya perubahan metode perhitungan jumlah penumpang. Pada tahun-tahun sebelumnya, perhitungan hanya mencakup penumpang transportasi laut umum. Namun, mulai tahun 2025, sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2025–2029, cakupan perhitungan diperluas dengan memasukkan penumpang angkutan anak sekolah. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah penumpang yang tercatat.

Pada tahun 2024, jumlah penumpang angkutan laut umum tercatat sebanyak 33.499 penumpang. Sementara itu, pada tahun 2025 target jumlah penumpang transportasi laut (gabungan penumpang umum dan anak sekolah) ditetapkan sebesar 77.048 penumpang, dengan realisasi mencapai 82.840 penumpang. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah penumpang dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 147,29%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota, yang berada di bawah koordinasi UPTD Pelayanan Transportasi. Kegiatan tersebut berperan penting dalam memastikan kelancaran operasional, perluasan layanan, serta peningkatan aksesibilitas transportasi laut bagi masyarakat.

3. PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 mencapai 99%, dengan realisasi sebesar 89,77% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90,42%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, realisasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesekretariatan berada pada kategori sangat baik dan relatif stabil dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seluruh bidang di Dinas Perhubungan Kota Batam.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil Survei Pelayanan Kesekretariatan Internal yang dilakukan kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan sebagai pengguna layanan. Survei tersebut menilai kualitas pelayanan Sekretariat dalam beberapa aspek, antara lain:

- Pengelolaan surat masuk dan surat keluar;
- Pelayanan administrasi kepegawaian (cuti, kenaikan pangkat, mutasi, dan layanan kepegawaian lainnya);
- Pelayanan administrasi keuangan (pembayaran gaji dan tunjangan, kenaikan gaji berkala);
- Pelayanan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja dan keuangan.

Pencapaian indikator program ini didukung oleh beberapa kegiatan utama, yaitu:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai Dinas Perhubungan;
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi pengadaan pakaian dinas serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai;

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi pengadaan kebutuhan operasional kantor seperti alat tulis kantor, perlengkapan listrik, pencetakan dokumen, konsumsi rapat, serta perjalanan dinas;
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi pengadaan kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, dan mebelair;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi pembayaran tenaga non-ASN/paruh waktu, cleaning service, serta pembayaran rekening listrik, air, telepon, dan internet;
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan dan operasional, peralatan elektronik (komputer, printer, AC), serta gedung kantor;
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD, yang merupakan dukungan operasional bagi UPTD Pelayanan Transportasi dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan.

Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berperan strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola administrasi yang tertib, akuntabel, dan responsif, sehingga mendukung optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, aspek pendanaan memegang peranan yang sangat strategis. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan pembiayaan

yang memadai, terencana, serta dikelola secara efektif dan akuntabel. Seluruh pembiayaan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Pada Perubahan Anggaran Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Batam memperoleh alokasi belanja langsung sebesar **Rp127.483.174.156,00**, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp114.695.934.671,00** atau mencapai **±90%** dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan anggaran yang baik, meskipun masih terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.

TABEL III.17
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025 Rp	REALISASI TAHUN 2025 Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.240.637.925,00	33.667.408.636,00	84%
1.1	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.437.404.245,00	20.905.145.823,00	89%
1.2	KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.478.000,00	22.904.000,00	94%
1.3	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.424.000,00	163.673.910,00	74%
1.4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.624.195.000,00	1.559.287.900,00	96%
1.5	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.730.390.680,00	1.615.761.252,00	93%
1.6	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	702.746.000,00	589.597.256,00	84%
1.7	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	12.500.000.000,00	8.811.038.495,00	70%

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2025 Rp	REALISASI TAHUN 2025 Rp	%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	81.065.369.383,00	75.265.529.634,00	93%
2.1	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.814.781.500,00	3.318.515.838,00	87%
2.2	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11.953.325.200,00	11.031.720.572,00	92%
2.3	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	501.532.320,00	492.575.000,00	98%
2.4	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	22.250.658.380,00	20.979.155.000,00	94%
2.5	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.329.600.000,00	636.815.200,00	48%
2.6	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41.215.471.983,00	38.806.748.024,00	94%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	6.177.166.848,00	5.762.996.401,00	93%
3.1	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	4.846.826.848,00	4.594.119.708,00	95%
3.2	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.330.340.000,00	1.168.876.693,00	88%
		127.483.174.156,00	114.695.934.671,00	89,97%

Secara rinci, realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp40.240.637.925,00** dengan realisasi sebesar **Rp33.667.408.636,00** atau **84%**. Realisasi ini mencerminkan dukungan terhadap kelancaran fungsi administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, pengadaan barang milik daerah, pemeliharaan aset, serta peningkatan pelayanan BLUD. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dalam mendukung operasional perangkat daerah.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar, yaitu **Rp81.065.369.383,00**, dan terealisasi sebesar **Rp75.265.529.634,00** atau **93%**. Tingginya persentase realisasi menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan pelayanan transportasi darat, meliputi penyediaan perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengujian kendaraan bermotor, audit dan inspeksi keselamatan, serta penyediaan angkutan umum dalam daerah. Capaian ini mendukung terwujudnya sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Batam.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini mendapatkan alokasi sebesar **Rp6.177.166.848,00** dengan realisasi sebesar **Rp5.762.996.401,00** atau **93%**. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan kegiatan penetapan lintas penyeberangan, pengawasan operasional pelabuhan pengumpan lokal, serta pembangunan dan penerbitan izin operasional pelabuhan. Capaian ini mendukung konektivitas wilayah kepulauan dan memperkuat pelayanan transportasi laut, khususnya bagi masyarakat hinterland.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup optimal dan proporsional terhadap capaian program. Penyerapan anggaran yang tinggi pada program-program utama menggambarkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan. Sementara itu, selisih anggaran yang tidak terserap mencerminkan adanya efisiensi serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dengan capaian realisasi anggaran tersebut, Dinas Perhubungan

Kota Batam telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi serta pembangunan sektor perhubungan secara berkelanjutan.



BAB IV PENUTUP



4.1. KESIMPULAN

Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir Dinas Perhubungan Kota Batam telah menunjukkan kinerja yang positif dengan mampu memenuhi sebagian besar sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya dalam peningkatan pelayanan transportasi serta penyediaan fasilitas keselamatan jalan, telah berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Meskipun demikian, capaian kinerja pada beberapa indikator masih belum sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Dinamika pembangunan Kota Batam yang terus berkembang, termasuk peningkatan dan pembukaan ruas-ruas jalan baru, menuntut penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap pertumbuhan wilayah serta mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum, Dinas Perhubungan telah melakukan langkah strategis melalui peremajaan armada Bus Trans Batam sebanyak 20 (dua puluh) unit yang mulai beroperasi pada 1 Januari 2024, dan pada tahun 2025 kembali ditambah sebanyak 13 (tiga belas) unit. Penambahan armada ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta keandalan layanan transportasi publik, sehingga dapat mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Harapannya, sistem

transportasi massal di Kota Batam dapat berkembang menjadi moda transportasi yang modern, ramah lingkungan, aman, dan nyaman serta menjadi kebanggaan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan Bus Sekolah, khususnya untuk wilayah hinterland, yang saat ini kondisinya masih perlu peningkatan dari sisi kelayakan dan kenyamanan. Hal ini menjadi perhatian penting guna menjamin keselamatan serta aksesibilitas transportasi bagi pelajar di wilayah kepulauan.

Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diberikan, sekaligus sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program. Keberhasilan maupun kekurangan yang tercermin dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengambilan keputusan, serta penetapan kebijakan pada periode berikutnya.

4.2. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Batam perlu terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program dan kegiatan. Optimalisasi koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan berlalu lintas dan peningkatan kualitas fasilitas transportasi.

Pengembangan sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas utama. Dalam mewujudkan transportasi yang modern di Kota Batam, dibutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi kinerja, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara sistematis dan berbasis data. Penguatan sistem informasi dan tata kelola kinerja akan sangat membantu dalam menghasilkan pengukuran yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Kerja sama serta komitmen seluruh unsur, baik internal maupun eksternal perangkat daerah, sangat diperlukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.